

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pasca kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa sektor, salah satunya dalam sektor demokrasi. Setelah masa reformasi Indonesia mulai melakukan pemilihan umum secara langsung disetiap daerah kabupaten dan kota untuk memilih kepala daerahnya yang dipilih langsung oleh rakyat yang sekarang disebut pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dimana saat itu rakyat Indonesia memilih calon pasangan kepala daerah yang akan menjadi wakil dari rakyat.

Untuk pilkada sendiri merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung, yang diselenggarakan di Indonesia. Yang mana pilkada ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari pesta demokrasi. Sekarang ini di seluruh wilayah Indonesia masyarakat dapat memilih kepala daerahnya secara bebas dan langsung.

Pemilihan kepala daerah ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana disitu dijelaskan bahwa pada pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. (BIP Kelompok Gramedia, hlm.75)

Akan tetapi dalam pelaksanaan pilkada ini sering berkembang isu-isu yang notabene akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Isu disini berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak yang bertujuan untuk membuat situasi menjadi krisis yang mana akan menimbulkan dampak di masyarakat. Dalam hal pesta demokrasi ini isu tersebut dinamakan isu politik.

Isu Politik merupakan suatu masalah atau fenomena yang terjadi saat akan diadakan nya suatu kegiatan yang akan mengakibatkan dampak positif juga negatif, akan tetapi hal ini belum bisa di uji atau belum jelas kebenarannya.

Dari berita yang dimuat oleh koran elektronik [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) dan data dari KPU Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa pada saat pemilihan kepala daerah Kota Cimahi tahun 2017 angka partisipasi masyarakat terdapat diangka presentase 72,8% untuk Kecamatan Cimahi Selatan, 74,6% untuk Kecamatan Cimahi Tengah, dan 75,2% untuk Kecamatan Cimahi Utara. Dengan presentase tersebut masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan di Kota Cimahi karena dibuktikan dengan hasil tersebut partisipasi masyarakat Kota Cimahi melebihi angka 50%. Hal ini menjadi yang sangat positif bagi pemerintah Kota Cimahi karena secara tidak langsung pemerintahan yang berjalan di Kota Cimahi sudah sedikit banyak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun yang terjadi saat ini masyarakat justru menjadi kurang percaya terhadap pemerintah. Hal ini terjadi karena berkembangnya isu-isu politik ditengah masyarakat Kota Cimahi yang menjadikan mereka memiliki opini masing-masing terhadap keberlangsungan pilkada maupun setelahnya. Ini haruslah diwaspadai oleh pemerintah setempat mengingat hal ini akan berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di suatu wilayah.

Hal yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran pemerintah di Kota Cimahi ialah memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan juga dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Cimahi. Contohnya pemerintah Kota Cimahi harus meningkatkan kinerja dalam hal memberikan pelayanan saat pembuatan surat-surat berharga, tidak memungut bayaran yang diluar semestinya, dan juga bekerja tepat waktu. Dengan begitu masyarakat akan memiliki penilaian yang positif terhadap pemerintah Kota Cimahi juga dengan begitu akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan program-program kerja yang telah disusun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul untuk penelitiannya yaitu mengenai “**Pengaruh Isu Politik Pilkada Yang Berkembang Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah** (*Studi Kasus di Kel.Baros, Kec.Cimahi Tengah, Kota Cimahi*)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cimahi belum bekerja sesuai harapan masyarakat, yang mana akan berdampak kepada jalannya roda pemerintahan di Kota Cimahi.
2. Masyarakat Kota Cimahi belum bisa percaya sepenuhnya terhadap pemerintahan yang berjalan di Kota tersebut, karena kinerja dari pemerintahan setempat belum sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Disaat akan dilangsungkannya pilkada di Kota Cimahi berkembang isu-isu politik pilkada yang membuat masyarakat Kota Cimahi semakin tidak percaya terhadap pemerintahan yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh oknum-oknum yang melempar isu di masyarakat sehingga berimbas kepada tingkat kepercayaan masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada pola pikir masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang mana peneliti akan mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Maka peneliti merumuskan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Cimahi terhadap pelaksanaan pilkada?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada ditengah isu yang berkembang?
3. Apakah masyarakat sepenuhnya percaya kepada pemerintah ditengah berkembangnya isu-isu politik saat pilkada?

### **D. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui informasi, mengkaji, dan memperoleh data mengenai bagaimana pengaruh isu politik pilkada yang berkembang terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pandangan masyarakat Kota Cimahi terhadap pelaksanaan pilkada.
2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Cimahi saat pilkada.
3. Mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditengah isu politik yang berkembang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis, sebagai berikut :

1. Teoretis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan berguna untuk pengetahuan mengenai politik yang berkembang di Indonesia, khususnya mengenai pengaruh isu politik yang berkembang terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Praktis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi masukan dalam memecahkan masalah yang terjadi, serta penelitian ini tidak hanya berguna untuk peneliti saja akan tetapi juga untuk menjadi bahan masukan bagi pembaca.

## **F. Definisi Operasional**

1. Politik

Menurut Rod Hague et al “*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members.*” (Rudi Salam: 2013, hlm.8)

Artinya yaitu politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. (Rudi Salam: 2013, hlm.8)

Menurut Andrew Heywood “*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation.*” (Rudi Salam: 2013, hlm.9)

Artinya politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. (Rudi Salam: 2013, hlm.9)

Jadi, dari dua teori diatas dapat disimpulkan bahwa politik itu ialah suatu jalan yang ditempuh warga negara untuk bisa mewujudkan cita-cita dan untuk kebaikan seluruh warga negara.

## **2. Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik adalah suatu hal yang sakral, karena pada dasarnya segala bentuk hubungan itu berawal dari sebuah kepercayaan. (Lindi: 2017, hlm.10)

Jadi pada dasarnya kepercayaan itu ialah suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, karena dengan adanya kepercayaan maka hubungan antar individu satu dan individu yang lainnya akan berjalan dengan harmonis.

## **3. Masyarakat**

Masyarakat ialah sekelompok organisasi yang menduduki atau yang mendiami suatu wilayah dan memiliki berbagai perbedaan dari setiap individunya baik dari segi ekonomi ataupun dari segi yang lainnya.

## **G. Sistematika Skripsi**

### **1. Bab I Pendahuluan**

Didalam bab pendahuluan ini terdapat beberapa poin di dalamnya, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

### **2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran**

Didalam bab II ini terdapat Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran mengenai Pengaruh Isu Politik Pilkada Yang Berkembang Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Di Kota Cimahi.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Didalam bab III ini terdapat metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

### **4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab IV ini membahas mengenai Pengaruh Isu Pilkada Yang Berkembang Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Di Kota Cimahi.

### **5. Bab V Kesimpulan dan Saran**

Didalam bab V ini terdapat kesimpulan serta saran yang memaparkan hasil dari penelitian mengenai Pengaruh Isu Pilkada Yang Berkembang Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Di Kota Cimahi.